



Menavigasi Dilema Moral Melalui Pertimbangan Etis Konselor Sekolah

Lucky Nindi Riandika Marfu'i^{1*}, Cut Munika Bastia Rahmadani¹, Sofyan Abdi¹, Bagus Julian Hikmy¹, Bayu Wiratsongko²

¹Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

²SMP Negeri Satu Atap 1 Candipuro

*Email : lucky.nindi@unj.ac.id

ABSTRAK

Studi ini menganalisis kemampuan pertimbangan etis konselor sekolah dalam menavigasi dilema moral menggunakan metode *systematic literature review* dengan pendekatan kualitatif. Dari 989 artikel di Semantic Scholar (10 tahun terakhir), dipilih 11 artikel relevan melalui seleksi inklusi dan eksklusi. Tahapan analisis meliputi pengorganisasian data, koding, sintesis teoritis, dan verifikasi silang sumber. Pertimbangan etis terbukti membantu konselor dalam mengambil keputusan etis saat menghadapi dilema moral. Namun, proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kondisi mental, beban administrasi, kejadian insidental, resiliensi moral, efikasi diri, kemampuan kognitif, serta peran teknologi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk berfokus pada pengembangan instrumen *ethical consideration* bagi konselor sekolah, serta pengembangan platform layanan bimbingan konseling (BK) berbasis AI beserta etika pemanfaatannya.

Kata Kunci : dilema moral; pertimbangan etis konselor; berpikir kritis; pengambilan keputusan etis

ABSTRACT

This study analyzes school counselors' ethical consideration in navigating moral dilemmas using a qualitative systematic literature review. Out of 989 articles retrieved from Semantic Scholar (past 10 years), 11 relevant articles were selected through strict inclusion and exclusion criteria. The analysis involved data organization, coding, theoretical synthesis, and source cross-verification. Ethical consideration effectively guides counselors in making ethical decisions when facing moral dilemmas. However, this process is challenged by various factors, including mental conditions, administrative burdens, incidental events, moral resilience, self-efficacy, cognitive processing abilities, and the evolving role of technology. Future research should focus on developing standardized ethical consideration instruments for school counselors and designing AI-based guidance and counseling platforms, alongside framework guidelines for their ethical utilization.

Keywords : *moral dilemmas; counselor ethical consideration; critical thinking; ethical decision making*

PENDAHULUAN

Dilema moral merupakan realitas intrinsik dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah yang sering kali menempatkan konselor pada posisi sulit di antara kepentingan siswa, kebijakan sekolah, dan harapan orang tua. Fenomena ini muncul ketika konselor dihadapkan pada situasi yang melibatkan dua prinsip etika yang saling bertentangan, di mana pengambilan keputusan untuk satu pihak berpotensi merugikan pihak lain (Moyer & Crewell, 2024; Stone, 2017). Kondisi mental konselor saat menghadapi dilema ini sering kali diwarnai oleh distres moral, kecemasan, dan perasaan tidak berdaya, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan kelelahan emosional atau *burnout* (Mullen & Gutierrez, 2016).

Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami konselor dalam menavigasi dilema ini berakar pada kemampuan *ethical consideration* (pertimbangan etis) yang masih tergolong lemah. Salah satu penelitian diantaranya menjelaskan bahwa banyak konselor cenderung mengandalkan intuisi subjektif atau kepatuhan administratif semata daripada melakukan analisis etis yang mendalam (Lambie et al., 2011). Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa rendahnya tingkat perkembangan kognitif dan moral berkorelasi langsung dengan ketidakmampuan konselor dalam mengidentifikasi isu etis yang kompleks (West & Moore, 2015). Lemahnya pertimbangan etis ini menjadi krusial karena peran konselor sekolah sangat vital dalam melindungi hak-hak siswa dan memastikan kesejahteraan mental mereka di tengah dinamika institusi (Ratts & Greenleaf, 2017).

Fenomena kelemahan pertimbangan etis ini sering kali diperparah oleh kondisi psikologis konselor yang terjebak dalam distres moral saat menghadapi konflik kepentingan. Penelitian oleh Mullen dan Gutierrez (2016) mengungkapkan bahwa ketika konselor tidak memiliki kerangka pengambilan keputusan etis yang kokoh, mereka cenderung mengalami kelelahan emosional yang tinggi, yang pada gilirannya menurunkan efikasi diri mereka dalam melakukan intervensi krisis. Di Indonesia, temuan serupa oleh Suwarjo dan Eva (2020) menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus sensitif seperti kekerasan seksual di sekolah, konselor sering kali mengalami dilema antara kewajiban melapor secara hukum dan menjaga kerahasiaan siswa, di mana kebingungan ini sering kali berujung pada pengambilan keputusan yang reaktif daripada proaktif.

Selain faktor internal, tekanan institusional dan ambiguitas peran di sekolah turut menjadi katalisator lemahnya analisis etis yang mendalam. Blake (2020) menyoroti bahwa banyak konselor sekolah menengah diinstruksikan untuk menjalankan tugas manajerial atau administratif yang berbenturan dengan peran profesional mereka sebagai advokat kesehatan mental siswa. Kondisi "dua loyalitas" ini kepada birokrasi sekolah di satu sisi dan kode etik profesi di sisi lain

menciptakan ruang abu-abu yang membuat konselor sulit untuk tetap objektif. Tanpa kapasitas berpikir kritis yang tajam, konselor sering kali "menyerah" pada kebijakan administratif sekolah meskipun kebijakan tersebut secara etis dapat merugikan hak-hak privasi atau kesejahteraan psikologis siswa (Stone, 2022).

Urgensi untuk meningkatkan *ethical consideration* semakin mendesak seiring dengan munculnya dilema etis baru di era digital dan pasca-pandemi. He dan Harris (2020) menjelaskan bahwa perubahan pola interaksi sosial menuntut praktisi untuk melakukan re-evaluasi terhadap filosofi pelayanan etis mereka, terutama dalam menjaga batasan profesional di dunia maya. Kesenjangan antara pesatnya perkembangan teknologi informasi dengan lambatnya adaptasi regulasi etis di sekolah menciptakan risiko malpraktik etis yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme deliberasi etis yang tidak hanya bersifat tekstual pada kode etik, tetapi juga refleksif terhadap konteks budaya dan perubahan zaman guna menjamin integritas profesi konselor di lingkungan pendidikan (Gimbert et al., 2021).

Pentingnya kemampuan *ethical consideration* pada konselor sekolah berkaitan erat dengan urgensi berpikir kritis. Berpikir kritis memungkinkan konselor untuk melakukan dekonstruksi masalah secara objektif, mengevaluasi konsekuensi jangka panjang, dan mempertahankan objektivitas di tengah tekanan otoritas (Sileo & Kopala, 1993). Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (*responsible decision-making*) merupakan luaran dari kematangan sosial-emosional yang harus dimiliki oleh setiap praktisi bimbingan (Gimbert et al., 2021). Namun, dalam realitas lapangan, sering terjadi ambiguitas peran di mana konselor lebih banyak dibebani tugas administratif daripada layanan klinis, yang pada akhirnya mengaburkan fokus etika profesional mereka (Blake, 2020).

Meskipun model-model pengambilan keputusan etis telah banyak tersedia, terdapat *gap* riset yang signifikan dalam literatur saat ini. Kebanyakan studi masih bersifat deskriptif mengenai jenis-jenis dilema yang dihadapi, namun sangat sedikit yang mengeksplorasi proses deliberasi internal konselor dalam menyeimbangkan antara regulasi diri dan tekanan institusional, terutama dalam konteks sekolah di era digital (Glossoff & Pate, 2019). Selain itu, instrumen pengukuran yang tersedia saat ini cenderung bersifat umum dan kurang mampu menangkap nuansa reflektivitas etis yang spesifik pada lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis literatur terkini guna merumuskan sebuah kerangka teori baru. Penelitian ini berusaha memetakan bagaimana konselor sekolah mengintegrasikan kompleksitas kognitif, kemampuan berpikir kritis, dan regulasi afektif dalam menghadapi dilema moral, serta mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk mengonstruksi instrumen guna mengukur kemampuan pertimbangan etis konselor sekolah.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis (*Systematic Literature Review*). Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasi seluruh temuan relevan terkait dilema moral dan pertimbangan etika konselor sekolah guna melahirkan sintesis teoritis baru (Snyder, 2019).

Data dikumpulkan melalui penelusuran elektronik pada beberapa basis data jurnal nasional dan internasional dari *resource* Semantic Scholar yang ditentukan dengan tahun terbit sepuluh tahun terakhir (2016- 2026). Kata kunci yang digunakan dalam pencarian menggunakan operator Boolean sebagai berikut: "*moral dilemmas counselor*" OR "*counselor ethical consideration*" OR "*school counselor*" OR "*counselor ethical decision making*".

Untuk menjaga kualitas dan relevansi data, peneliti menetapkan kriteria seleksi artikel sebagai berikut: Kriteria Inklusi: (1) Artikel jurnal ilmiah hasil penelitian primer atau tinjauan konseptual; (2) Diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir (2016–2026); (3) Fokus pembahasan pada etika profesi konselor di setting sekolah; (4) Tersedia dalam teks lengkap (*full-text*). Kriteria Eksklusi: (1) Artikel yang tidak melalui proses *peer-review* (seperti blog atau artikel populer); (2) Makalah konferensi yang tidak lengkap; (3) Studi yang berfokus pada etika medis atau bisnis di luar konteks pendidikan.

Berdasarkan hasil pencarian awal menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish*, ditemukan sebanyak 989 artikel dengan kata kunci yang digunakan dari sumber data *semantic scholar*, namun artikel yang relevan dari keseluruhan kurang lebih hanya 467 artikel yang memuat pembahasan berkaitan dengan Bimbingan dan Konseling. Selain itu, keseluruhan artikel tersebut masih memuat pembahasan *ethical consideration* pada bidang kesehatan dan bisnis manajemen. Selain itu, artikel-artikel yang termuat dalam file *reference manager* yang dikumpulkan juga memuat pembahasan *ethical consideration* yang tidak spesifik ke pembahasan pengambilan keputusan etis konselor sekolah. Setelah melalui tahap penyaringan judul dan abstrak, serta penghapusan duplikasi, terpilih 11 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk dianalisis lebih lanjut yang terdiri dari 10 artikel internasional dan 1 artikel jurnal nasional terakreditasi). Data dianalisis menggunakan analisis konten tematik (*Thematic Content Analysis*) dengan tahapan sebagai berikut: mengorganisasikan data: mengelompokkan artikel berdasarkan tema utama (misalnya: jenis dilema, hambatan institusional, atau efikasi diri); koding: mengidentifikasi konsep-konsep kunci terkait proses kognitif konselor saat menghadapi konflik moral; sintesis teoritis: menghubungkan temuan-temuan dari berbagai literatur untuk membangun kerangka teori *ethical reflexive deliberation* (erd); validasi: melakukan verifikasi silang antar sumber literatur untuk memastikan konsistensi temuan dan meminimalkan bias peneliti; prosedur ekstraksi. Peneliti menggunakan tabel ekstraksi untuk mencatat nama penulis, tahun, judul, fokus

penelitian, dan kesimpulan utama dari setiap artikel. Proses ini memastikan bahwa setiap literatur berkontribusi secara signifikan dalam menjawab *gap* riset yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan. Selain itu, *gap* riset tersebut ditelaah kembali untuk disimpulkan agar menjadi rekomendasi untuk menentukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan *counselor ethical consideration* atau pertimbangan etika konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

LANDASAN TEORITIS

Dilema moral merupakan kondisi ketegangan psikologis dan profesional di mana konselor sekolah harus memilih di antara dua opsi yang saling bertentangan, namun keduanya memiliki pembenaran moral yang kuat (Kitchener, 1984). Marfu'i et al. (2025) menjelaskan melalui studi fenomenologis bahwa dilema moral bukan sekadar kebingungan teknis, melainkan pengalaman subjektif yang mendalam di mana konselor merasa "terjepit" di antara nilai-nilai kemanusiaan, aturan institusi, dan standar profesi.

Dalam konteks sekolah di Indonesia, dilema ini sering kali diperparah oleh tumpang tindihnya peran konselor sebagai pendidik sekaligus pemberi layanan klinis-psikologis (Suroso & Nashori, 2021). Kondisi ini menciptakan situasi di mana keputusan yang benar menurut kode etik profesi mungkin dianggap salah atau tidak kooperatif oleh manajemen sekolah (Bodenhorn, 2006).

Terdapat beberapa dimensi nyata yang dialami konselor sekolah saat menghadapi dilema moral: Konflik Kerahasiaan vs. Transparansi Institusional: Konselor sering dihadapkan pada tekanan dari kepala sekolah atau guru mata pelajaran untuk membuka data pribadi siswa demi alasan kedisiplinan. Hal ini sejalan dengan pandangan Isaacs dan Stone (1999) mengenai betapa rapuhnya batas kerahasiaan di lingkungan sekolah. Dualisme peran (Konselor vs. Polisi Sekolah): Marfu'i et al. (2025) menyoroti fenomena di mana konselor diharapkan menjadi penegak aturan sekolah, padahal peran etis mereka adalah membangun aliansi terapeutik yang aman bagi siswa (Moyer & Crews, 2016). Ketegangan etis pada Kasus Sensitif: Dalam kasus kehamilan remaja atau kekerasan seksual, konselor mengalami dilema moral antara melindungi privasi siswa atau memenuhi kewajiban hukum untuk melapor kepada pihak berwenang dan orang tua (White & Morgan, 2012).

Faktor pengaruh dalam persepsi dilema. Proses konselor dalam mempersepsikan dan merasakan dilema moral dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci: kematangan moral dan nilai personal: konselor dengan tingkat perkembangan kognitif yang tinggi cenderung mampu melihat kompleksitas masalah dan tidak terjebak pada solusi hitam-putih (Warren & Baker, 2013);

budaya dan iklim sekolah: Marfu'i et al. (2025) menekankan bahwa budaya sekolah yang tidak memahami esensi bimbingan konseling menjadi pemicu utama munculnya dilema moral. Tekanan administratif sering kali mengabaikan prinsip *beneficence* (berbuat baik) demi efisiensi birokrasi (Unger, 2011); dukungan sosial dan supervisi: minimnya wadah diskusi atau supervisi klinis bagi konselor sekolah di Indonesia membuat dilema moral sering kali dipikul secara individual, yang berisiko pada pengambilan keputusan yang bias (Herlihy & Corey, 2015).

Pengalaman menghadapi dilema moral yang berkepanjangan tanpa resolusi yang tepat dapat memicu *moral distress*. Marfu'i et al. (2025) menemukan bahwa konselor yang merasa gagal bertindak sesuai nurani profesionalnya karena tekanan eksternal mengalami kecemasan, rasa bersalah, dan kelelahan mental. Dampak ini secara sistemik dapat menurunkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah (Dailor & Jacob, 2011).

Resolusi atas dilema moral memerlukan pendekatan multidimensi. Pertama, penguatan literasi etika yang tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual (Stone, 2017). Kedua, penggunaan model pengambilan keputusan etis yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi konsekuensi (Cottone & Tarvydas, 2016). Marfu'i et al. (2025) menyarankan pentingnya penguatan posisi tawar konselor di sekolah melalui edukasi berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah mengenai kode etik profesi konseling

Pertimbangan etis dalam bimbingan dan konseling merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang kompleks, di mana konselor harus mengintegrasikan pengetahuan profesional, nilai-nilai moral, dan standar hukum (Cottone & Tarvydas, 2016). Menurut American School Counselor Association (ASCA, 2022), pertimbangan etis bagi konselor sekolah bukan sekadar mematuhi daftar larangan, melainkan sebuah komitmen proaktif untuk memprioritaskan hak-hak siswa di tengah dinamika lingkungan pendidikan yang menantang.

Welfel (2015) menekankan bahwa etika adalah standar perilaku profesional yang memandu konselor untuk memberikan pelayanan maksimal sekaligus meminimalkan risiko bahaya. Dalam praktiknya, konselor sekolah sering kali terjebak dalam "pusaran etis" karena harus menyeimbangkan loyalitas antara siswa sebagai konseli, orang tua sebagai pemegang hak legal, dan sekolah sebagai institusi (Bodenhorn, 2006). Oleh karena itu, pertimbangan etis memerlukan penalaran moral yang matang agar keputusan yang diambil memiliki dasar argumen yang kuat secara teoretis maupun praktis (Lambie et al., 2011).

Dalam membedah pertimbangan etis, terdapat beberapa dimensi utama yang menjadi indikator profesionalisme seorang konselor sekolah: Prinsip Moral

Dasar. Kitchener (1984) merumuskan lima prinsip utama yang menjadi ruh dalam setiap pertimbangan etis. Pertama, *autonomy*, yaitu menghormati hak siswa dalam menentukan pilihannya sendiri. Kedua, *non-maleficence*, yaitu kewajiban untuk tidak mencelakai siswa baik secara fisik maupun psikologis (Remley & Herlihy, 2020). Ketiga, *beneficence*, yang menekankan bahwa setiap tindakan konselor harus bertujuan untuk kebaikan siswa (Corey et al., 2018). Keempat, *justice*, yakni memberikan layanan secara adil tanpa memandang latar belakang (Gladding, 2017). Kelima, *fidelity*, yang berkaitan dengan kejujuran dan pemenuhan janji dalam hubungan konseling (Bond, 2015).

Kerahasiaan (*Confidentiality*) dan Batasannya Kerahasiaan adalah jantung dari hubungan konseling, namun di sekolah, hal ini menjadi isu yang paling dilematis (Isaacs & Stone, 1999). Konselor harus mempertimbangkan kapan informasi harus dijaga kerahasiaannya dan kapan harus dibuka demi keselamatan siswa (Lazovsky, 2008). White dan Morgan (2012) menyatakan bahwa batas kerahasiaan harus dijelaskan sejak awal (*informed consent*) agar siswa memahami hak dan batasan mereka.

Kompetensi dan Kolaborasi Multidisiplin. Konselor sekolah yang etis menyadari batas kompetensinya dan tidak ragu untuk melakukan rujukan (*referral*) kepada ahli lain jika masalah siswa melampaui kapasitasnya (Stone, 2017). Selain itu, kolaborasi dengan guru atau staf sekolah lainnya harus tetap menjaga koridor etis agar privasi siswa tidak terekspos secara tidak perlu (Luke et al., 2013).

Keputusan etis tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan: Faktor Internal Konselor. Kematangan kognitif dan tahap perkembangan sosial-kognitif konselor sangat menentukan bagaimana mereka memproses dilema etis (Warren & Baker, 2013). Pendidikan dan pelatihan formal yang diterima konselor mengenai etika memberikan landasan metodologis dalam memecahkan masalah (Moyer & Crews, 2016). Selain itu, nilai-nilai pribadi dan keyakinan agama konselor terkadang dapat bersinggungan dengan standar profesional, sehingga diperlukan refleksi diri yang mendalam agar tidak terjadi bias dalam pelayanan (Suroso & Nashori, 2021).

Faktor Lingkungan dan Budaya Sekolah. Tekanan administratif dari kepala sekolah atau tuntutan dari orang tua sering kali menjadi tantangan eksternal terbesar (Moyer et al., 2012). Budaya sekolah yang tidak mendukung privasi siswa dapat memperumit pertimbangan etis konselor (Unger, 2011). Selain itu, konselor dituntut memiliki sensitivitas multikultural untuk memahami bahwa standar etis tertentu mungkin perlu diadaptasi sesuai konteks budaya siswa tanpa melanggar prinsip dasar (Sue & Sue, 2016; Pack-Brown et al., 2008).

Standar Legal dan Organisasi. Kepatuhan terhadap kode etik organisasi seperti American Counseling Association (ACA, 2014) dan hukum yang berlaku di suatu wilayah menjadi faktor penentu tindakan (Herlihy & Corey, 2015). Konselor harus mampu membedakan antara tindakan yang bersifat legal (sesuai hukum) dan tindakan yang bersifat etis (sesuai moralitas profesi) (Schmidt, 2014).

Model Pengambilan Keputusan Etis

Untuk mengatasi kerumitan tersebut, para ahli menyarankan penggunaan model sistematis (Froeschle & Crews, 2017). Model kolaboratif yang melibatkan diskusi dengan rekan sejawat atau supervisor sering kali menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan minim bias pribadi (Zambrano, 2020; Dailor & Jacob, 2011). Pada akhirnya, pertimbangan etis adalah bentuk advokasi konselor terhadap siswa, di mana konselor bertindak sebagai pelindung bagi mereka yang rentan di lingkungan sekolah (Thomas & Pender, 2008; Stone, 2017).

Dengan mengintegrasikan standar dari ACA (2014) dan program bimbingan komprehensif (Schmidt, 2014), konselor diharapkan mampu menyeimbangkan peran mereka sebagai pendidik dan terapis (Unger, 2011). Seperti yang dirangkum oleh Wester (2019) serta Suroso dan Nashori (2021), integritas seorang konselor sekolah tercermin dari kemampuannya mengambil keputusan sulit yang tetap memanusiaikan siswa meskipun di bawah tekanan sistemik. Dengan kata lain, pertimbangan etis adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan integrasi antara hati nurani, pengetahuan teoretis, dan kepatuhan pada standar profesi (Wester, 2019; Dailor & Jacob, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didasarkan tinjauan literatur dari sumber data artikel Semantic Scholar. Jika peneliti ingin memperdalam hasil penelitian, maka perlu ditambahkan hasil dari sumber data lainnya seperti WoS, PubMed, dan beberapa *resources* lainnya. Data hasil tinjauan ini hanya memuat pembahasan dari 11 artikel saja dikarenakan penelitian *ethical consideration* atau pertimbangan etis konselor masih jarang dibahas dan diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasannya yang akan dibahas secara sistematis dan akan menghasilkan simpulan berupa gap atau kesenjangan riset untuk menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil tinjauan literatur dari *resource* Semantic Scholar dengan pencarian menggunakan *keywords* boolean "*moral dilemmas counselor*" OR "*counselor ethical consideration*" OR "*school counselor*" OR "*counselor ethical decision making*"

didapatkan hasil 989 artikel. Namun, dari seluruh hasil tersebut tidak semua artikel memuat pembahasan berkaitan dengan “*ethical consideration*” atau kemampuan pertimbangan etis konselor, melainkan membahas mengenai permasalahan yang ditangani konselor dan membutuhkan pengambilan keputusan etis. Beberapa artikel diantaranya yang tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dikarenakan isi artikel tidak memuat kata kunci atau *keywords* yang ditetapkan berdasarkan topik yang dianalisis pada judul penelitian ini. Analisis ini difokuskan pada topik kemampuan konselor dalam mengambil keputusan etis, pertimbangan etis konselor, dilema moral, dan peran konselor saat memberikan layanan BK di sekolah.

Tabel 1. Hasil Tinjauan Literatur

No	Penulis	Tahun	Judul Artikel	Fokus Utama Pembahasan	Simpulan Hasil Penelitian
1	Abdul Hamid	2017	<i>Guru Profesional</i>	Peran guru BK sebagai model perilaku etis bagi siswa melalui pendekatan bimbingan kelompok.	Bimbingan kelompok efektif untuk menanamkan nilai-nilai etis, kesadaran, dan tindakan bermoral pada siswa. Dapat disimpulkan bahwa konselor perlu memiliki kemampuan <i>ethical consideration</i> yang baik agar dapat memberikan contoh kepada siswanya agar memiliki kemampuan mempertimbangkan etis dengan baik pula.
2	Dylan B. Jackson, et al.	2019	<i>Police Stops Among At-Risk Youth</i>	Dampak kesehatan mental dari interaksi polisi dengan remaja berisiko di sekolah.	Intervensi polisi di sekolah sering menimbulkan trauma; konselor sekolah harus menyediakan skrining mental setelah kejadian tersebut. Risiko pekerjaan yang membuat konselor sekolah memiliki tekanan pada kognitifnya sehingga kesehatan mentalnya rawan terganggu.
3	Gimbert, B., et al.	2021	<i>Social Emotional Learning in Schools</i>	Pentingnya kompetensi sosial emosional (SEL) bagi	Pendidik perlu menguasai kesadaran diri dan pengambilan keputusan etis yang bertanggung

- | | | | | |
|---|---|------|---|---|
| | | | pendidik, termasuk konselor sekolah. | jawab untuk meningkatkan praktik pedagogis di sekolah. |
| 4 | Rushton, C. | 2016 | <i>Moral Resilience: A Capacity for Navigating Moral Distress</i> | Pengembangan kapasitas resiliensi moral pada tenaga profesional. Resiliensi moral merupakan kemampuan internal untuk mempertahankan integritas pribadi di tengah tekanan dilema etis yang berat. |
| 5 | P. Mullen & Daniel Gutierrez | 2016 | <i>Burnout, Stress, and Direct Student Services Among School Counselors</i> | Hubungan antara stres kerja, kelelahan (<i>burnout</i>), dan kualitas layanan siswa. Stres tinggi akibat dilema moral dan kelelahan mental yang tidak terkelola dapat menurunkan frekuensi dan kualitas layanan bimbingan langsung kepada siswa. |
| 6 | Ratts, M. J. & Greenleaf, A. | 2017 | <i>Multicultural and Social Justice Counseling Competencies</i> | Kompetensi konseling dalam keadilan sosial dan multikultural di sekolah. Konselor harus mengintegrasikan kesadaran diri dan advokasi sosial untuk mengatasi ketimpangan sistemik pada siswa. Dalam hal ini, konselor sekolah perlu memiliki kemampuan <i>ethical consideration</i> dan pengambilan keputusan etis yang tinggi agar dapat melakukan layanan advokasi terhadap ketimpangan sosial tersebut. |
| 7 | West, S. & Moore, J. L. | 2015 | <i>Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs (CACREP)...</i> | Standar akreditasi program pendidikan konselor dan dampaknya pada kualitas lulusan. Akreditasi yang ketat sangat penting untuk memastikan konselor memiliki dasar etika dan profesionalisme yang terstandarisasi. Pentingnya penanaman nilai moral pada calon konselor dalam menempuh pendidikan |

					tinggi dalam menghadapi dilema etis.
8	Mullen, P. R., et al.	2018	<i>School Counselors' Self-Efficacy with Student Suicide Intervention</i>	Efikasi diri konselor sekolah dalam menangani krisis atau dilema bunuh diri siswa.	Terdapat hubungan positif antara pelatihan berkelanjutan dengan keberanian konselor mengambil keputusan etis saat krisis dan mengalami dilema moral.
9	Jackson, D. B., et al.	2019	<i>Police Stops Among At-Risk Youth</i>	Dampak psikologis interaksi polisi dengan siswa di lingkungan sekolah.	Trauma akibat pengawasan ketat memerlukan intervensi konselor yang sensitif secara etis untuk memulihkan kesehatan mental siswa.
10	Gimbert, B., et al.	2021	<i>Social Emotional Learning in Schools</i>	Implementasi pembelajaran sosial emosional (SEL) oleh pendidik dan konselor.	Penguasaan SEL pada konselor memperkuat kemampuan pengambilan keputusan etis yang bertanggung jawab (<i>responsible decision-making</i>).
11	Blake, M.	2020	<i>Other Duties as Assigned: The Ambiguous Role of High School Counselor</i>	Konflik peran konselor sekolah akibat beban tugas administratif.	Ambiguitas peran menghambat konselor untuk fokus pada pertimbangan etis dan layanan klinis yang mendalam bagi siswa.

Berdasarkan kumpulan artikel di atas, sintesis mengenai kondisi konselor sekolah saat ini berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan keputusan etis dalam praktiknya di sekolah yaitu meliputi integritas dan posisi perannya, tekanan dan ambiguitas perannya, kebutuhan kompetensi multidimensionalnya dalam menavigasi dilema moral, kompetensi sosial-emosional, dan kemampuan berpikir kritis dan regulasi diri yang tinggi dalam mempertimbangkan keputusan moral dalam memberikan layanan Bimbingan dan Konseling.

Konselor sekolah memiliki peran sentral sebagai "kompas etis" di lingkungan sekolah. Etika bukan sekadar pengetahuan, tetapi tindakan nyata yang harus dicontohkan melalui bimbingan kelompok untuk membentuk karakter siswa. Sebagai konselor juga mereka mengalami tekanan dan ambiguitas peran di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena di mana konselor mengalami

kesulitan dalam memberikan layanan maksimal karena "ambiguitas peran". Seringkali, konselor dipaksa melakukan tugas administratif (tugas manajerial) yang berbenturan dengan peran profesional mereka sebagai penyedia layanan kesehatan mental, yang pada akhirnya memicu stres dan *burnout*. Selain itu, tekanan atau permasalahan psikologis konselor tersebut dapat mengurangi kemampuan profesional konselor dalam memberikan layanan konseling di sekolah kepada siswa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil tinjauan literatur dari *resource* Semantic Scholar dengan pencarian menggunakan *keywords* boolean "*moral dilemmas counselor*" OR "*counselor ethical consideration*" OR "*school counselor*" OR "*counselor ethical decision making*" didapatkan hasil hanya 11 artikel dari 467 artikel yang telah terseleksi. Namun, dari seluruh hasil tersebut tidak semua artikel setelah diseleksi memuat pembahasan pertimbangan etis konselor dalam mengambil keputusan etis. Beberapa diantaranya membahas mengenai permasalahan siswa berkaitan dengan layanan Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan oleh konselor. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan etis konselor belum dibahas secara spesifik dari segi instrumen untuk mengukurnya hingga rancangan pelatihan yang digagas untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Sedangkan, kompetensi tersebut dapat menavigasi dilema moral konselor sekolah ketika dalam situasi terhimpit.

Penavigasian dilema moral di sekolah memerlukan integrasi antara Kompetensi Sosial Emosional (SEL) dan Kompetensi Multikultural. Tanpa regulasi diri yang kuat (SEL), konselor akan sulit mengambil keputusan yang bertanggung jawab saat menghadapi situasi kritis seperti interaksi traumatis siswa dengan otoritas. Walaupun konselor memiliki kemampuan profesional dan sesuai dengan kode etik konselor dalam memberikan layanan BK, tidak menutup kemungkinan mereka masih mengalami dilema moral ketika menghadapi situasi kritis atau terhimpit tersebut (Oktadinata dkk., 2025). Kemampuan konselor sekolah dalam menavigasi dilema moral berakar pada kesadaran mendalam terhadap nilai-nilai pribadi dan pemahaman yang komprehensif mengenai *ethical consideration* untuk memastikan kesejahteraan klien (Corey dkk., 2019). Proses pengambilan keputusan etis yang efektif memerlukan penerapan standar profesional secara praktis dan kritis dalam menghadapi situasi klinis yang kompleks guna meminimalisir risiko bahaya (Herlihy & Corey, 2014).

Kondisi konselor sekolah saat ini menunjukkan bahwa kemampuan pertimbangan etis tidak hanya bergantung pada pemahaman kode etik statis, tetapi merupakan manifestasi dari integritas personal dan posisi peran yang kompleks. Menurut Lambie dkk. (2011), tingkat perkembangan ego dan kompetensi etis konselor berkorelasi signifikan dengan kemampuan mereka dalam menavigasi dilema moral yang rumit. Konselor yang memiliki "kompas etis" yang kuat

mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial ke dalam tindakan nyata, melampaui sekadar kepatuhan administratif. Namun, ketika integritas ini berbenturan dengan realitas lapangan, muncul kebutuhan mendesak akan resiliensi moral (Rushton, 2016) untuk menjaga standar profesionalisme di tengah lingkungan sekolah yang dinamis.

Tekanan dan ambiguitas peran menjadi hambatan struktural utama yang mendistorsi fungsi profesional konselor sebagai penyedia layanan kesehatan mental. Mullen dkk. (2018) menyoroti bahwa beban kerja non-konseling yang tinggi dan tugas manajerial sering kali menyebabkan stres kerja dan *burnout*, yang secara langsung mengikis kualitas pengambilan keputusan etis. Fenomena ini diperburuk oleh ketidakjelasan ekspektasi dari pihak sekolah, di mana konselor sering kali "dipaksa" menjadi penegak disiplin alih-alih menjadi ruang aman bagi siswa. Ambiguitas ini menciptakan konflik peran yang menurut Bardhoshi dkk. (2014) menurunkan efikasi diri konselor dan membatasi waktu mereka untuk memberikan intervensi klinis yang mendalam.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, konselor memerlukan kompetensi multidimensional yang mencakup regulasi diri, berpikir kritis, dan kecerdasan sosial-emosional yang tinggi. Penelitian oleh Dietz dan Thompson (2020) menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis memungkinkan konselor untuk melakukan dekonstruksi terhadap dilema etis yang ambigu, terutama dalam situasi krisis. Selain itu, kompetensi sosial-emosional berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) terhadap tekanan eksternal, memungkinkan konselor untuk tetap tenang dan objektif saat mengambil keputusan sulit (Pascoe dkk., 2020). Kemampuan regulasi diri ini menjadi kunci agar konselor tidak terjebak dalam bias personal atau tekanan emosional sesaat yang dapat merugikan kesejahteraan siswa.

Kemampuan konselor sekolah dalam menavigasi dilema moral merupakan manifestasi langsung dari kedalaman *ethical consideration* atau pertimbangan etis yang mereka miliki. Berdasarkan temuan Akfert (2012) dan Marfu'i dkk. (2025), dilema moral seringkali muncul dari benturan antara kewajiban menjaga kerahasiaan konseli dengan tuntutan keterbukaan informasi dari pihak sekolah atau orang tua dan rekan sejawat di sekolah. Dalam situasi yang ambigu ini, pengambilan keputusan etis bukan sekadar prosedur teknis, melainkan proses kognitif dan emosional yang kompleks (Bodernhorn, 2016). Konselor yang memiliki kesadaran etis tinggi cenderung tidak hanya bersandar pada aturan formal, tetapi juga menggunakan intuisi profesional dan refleksi fenomenologis untuk memahami esensi permasalahan, sehingga keputusan yang diambil tetap berpijak pada perlindungan kesejahteraan siswa sebagai prioritas utama.

Namun, proses pengambilan keputusan etis ini membawa dampak signifikan terhadap kondisi internal konselor itu sendiri. Oktadinata dkk. (2025)

menekankan bahwa tantangan dalam menghadapi dilema etis yang terus-menerus dapat menjadi beban psikologis yang mengancam *well-being* atau kesejahteraan konselor sekolah. Ambiguitas peran dan tekanan eksternal sering kali memicu stres profesional ketika konselor merasa gagal memenuhi standar etis ideal akibat kendala struktural. Oleh karena itu, kemampuan pengambilan keputusan etis yang efektif memerlukan dukungan regulasi diri dan efikasi diri yang kuat (Shillingford, M. A., & Lambie, G, 2010). Riset-riset ini secara kolektif menegaskan bahwa penguatan kompetensi etis harus dibarengi dengan manajemen kesehatan mental bagi konselor, agar mereka tetap mampu menjadi "kompas moral" di sekolah tanpa mengorbankan kesejahteraan pribadi mereka.

Sintesis dari berbagai literatur internasional ini menegaskan bahwa faktor internal seperti efikasi diri dan faktor eksternal seperti iklim organisasi sekolah saling berinteraksi dalam membentuk perilaku etis. Pengalaman krisis, seperti pandemi COVID-19, telah memperluas cakupan dilema moral yang dihadapi, mulai dari isu privasi digital hingga kesenjangan akses layanan (Savitz-Romer dkk., 2020). Oleh karena itu, kebutuhan akan instrumen baru yang mampu mengukur *Ethical Consideration* secara spesifik menjadi sangat relevan. Pengembangan instrumen tersebut harus mampu memotret bagaimana konselor menyeimbangkan prinsip keadilan sosial dengan tuntutan birokrasi, sebagaimana ditekankan oleh Ratts dkk. (2016) mengenai pentingnya kompetensi multikultural dan keadilan sosial dalam praktik konseling kontemporer.

Berdasarkan analisis literatur tersebut, ditemukan beberapa gap riset sebagai berikut: Kurangnya fokus pada proses deliberasi internal. Sebagian besar penelitian membahas *hasil* (seperti burnout, efektivitas layanan, atau peran administratif), namun masih sedikit yang secara spesifik meneliti proses kognitif dalam melakukan pertimbangan etis oleh konselor saat mereka berada tepat di tengah dilema moral yang saling bertentangan. Kesenjangan instrument. Meskipun ada evaluasi kinerja (seperti model CSE-UCLA), instrumen yang secara khusus mengukur kapasitas "*Ethical Consideration*" konselor dalam konteks spesifik sekolah masih sangat terbatas. Konteks krisis dan teknologi. Artikel mengenai dilema moral konselor sekolah saat pandemi menunjukkan kebutuhan adaptasi teknologi, namun belum banyak penelitian yang mengeksplorasi dilema etis yang muncul akibat penggunaan AI atau media sosial dalam pelaksanaan konseling sekolah di Indonesia.

Hasil analisis literatur tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai dilema moral tidak hanya terbatas pada teori, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (seperti beban kerja administratif dan krisis pandemi/kejadian insidental lainnya) serta faktor internal (seperti efikasi diri dan resiliensi moral konselor). Bagi konselor sekolah, tantangan utamanya adalah bagaimana tetap konsisten pada prinsip keadilan sosial di tengah ambiguitas peran di sekolah. Data ini sangat

mendukung argumen Anda mengenai perlunya instrumen baru yang mengukur *Ethical Consideration* konselor secara spesifik.

PENUTUP

Kemampuan konselor dalam mempertimbangkan keputusan atau disebut *ethical consideration* memiliki peran penting dalam pemberian layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Berdasarkan hasil analisis literature review yang disusun dapat disimpulkan bahwa pertimbangan etis konselor dapat menavigasi dilema moral konselor dalam pengambilan keputusan etis. Dalam melakukan pertimbangan etis, konselor dihadapkan pada benturan-benturan seperti kondisi mental, beban administrasi, kejadian insidental, resiliensi moral, efikasi diri, kemampuan proses kognitif yang dimiliki konselor, dan adanya peran teknologi dalam menavigasi dilema moral dalam memberikan layanan BK di sekolah. Hal ini menjadi temuan baru karena pada penelitian sebelumnya navigasi dilema moral dan pertimbangan pengambilan keputusan etis konselor belum pernah dikaji sehingga temuan ini memuat teori baru dalam penelitian Bimbingan dan Konseling. Gap atau kesenjangan penelitian dari beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan banyak hal yang belum diteliti dan dikaji lebih mendalam berkaitan dengan dilema moral dan *counselor ethical consideration*.

Kesenjangan tersebut meliputi proses kognitif ketika konselor dalam mempertimbangkan keputusan etis saat mengalami dilema moral, belum tersedianya instrumen untuk mengukur kemampuan *ethical consideration* konselor sekolah, dan belum banyak penelitian yang mengeksplorasi dilema etis yang muncul akibat penggunaan AI atau media sosial dalam konseling sekolah di Indonesia. Tinjauan artikel ini berdasarkan dari satu sumber data saja yaitu Semantic Scholar, sehingga perlu dipertajam lagi berdasarkan beberapa sumber data lain seperti Scopus, WoS, dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merekomendasikan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan konstruk instrumen yang mengidentifikasi *ethical consideration* konselor sekolah, mengeksplorasi proses kognitif konselor saat mengalami dilema moral, dan pengembangan platform layanan BK berbasis AI serta etika pemanfaatannya dalam pemberian layanan BK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. (2017). Guru Profesional. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 2(1), 9-15. <https://doi.org/10.26737/jbki.v2i1.238>
- American School Counselor Association. (2022). *ASCA ethical standards for school counselors*. Alexandria, VA: ASCA

- American Counseling Association. (2014). *ACA code of ethics*. Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Bardhoshi, G., dkk. (2014). Predictors of school counselor burnout: A redemptive story. *Journal of School Counseling*, 12(4), 1-28. <http://www.jsc.montana.edu/articles/v12n4.pdf>
- Blake, M. (2020). Other Duties as Assigned: The Ambiguous Role of High School Counselor. *Journal of School Counseling*, 18(26). <https://eric.ed.gov/?id=EJ1271131>
- Bodenhorn, N. (2016). Exploratory study of common ethical dilemmas experienced by high school counselors. *Professional School Counseling*, 9(3). <https://doi.org/10.1177/2156759X0500900307>
- Bond, T. (2015). *Standards and ethics for counselling in action* (4th ed.). London, United Kingdom: Sage Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/standards-and-ethics-for-counselling-in-action/book239276>
- Corey, G., Corey, M. S., & Corey, C. (2019). *Issues and Ethics in the Helping Professions* (10th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning.
- Corey, G., Corey, M. S., & Corey, C. (2018). *Issues and ethics in the helping professions* (10th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning. <https://www.cengage.com/c/issues-and-ethics-in-the-helping-professions-10e-corey/9781337567183/>
- Cottone, R. R., & Tarvydas, V. M. (2016). *Ethics and decision making in counseling and psychotherapy* (4th ed.). New York, NY: Springer Publishing Company. <https://doi.org/10.1891/9780826171726>
- Dailor, A. N., & Jacob, S. (2011). Ethically challenging situations reported by school psychologists: Implications for training and practice. *Psychology in the Schools*, 48(6), 619-631. <https://doi.org/10.1002/pits.20574>
- Davis, C., et al. (2020). Caring for Children with Eating Disorders in COVID-19. *Journal of Pediatric Psychology*, 45(7), 723-730. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsaa053>
- Dietz, S. S., & Thompson, I. A. (2020). *Ethics and Social Justice in School Counseling*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429023439>
- Froeschle, J. G., & Crews, C. (2017). An ethics-based model for school counselors. *Journal of School Counseling*, 15(10). <http://www.jsc.montana.edu/articles/v15n10.pdf>
- Gimbert, B., Miller, D., Herman, E., & Breedlove, M. (2021). Social Emotional Learning in Schools. *Journal of Educational Research*, 114(3), 221-235. <https://doi.org/10.1080/00220671.2021.1921674>
- Gladding, S. T. (2017). *Counseling: A comprehensive profession* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Glossoff, H. L., & Pate, R. H. (2019). Privacy and Confidentiality in School Counseling. *Professional School Counseling*, 6(1), 20-27.

- He, H., & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on CSR and marketing philosophy. *Journal of Business Research*, 116, 176-182. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.030>
- Herlihy, B., & Corey, G. (2015). *ACA Ethical Standards Casebook* (7th ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association.
- Isaacs, M. L., & Stone, C. (1999). School counselors and confidentiality: Factors affecting professional choices. *Professional School Counseling*, 2(4), 258-266.
- Jackson, D. B., et al. (2019). Police Stops Among At-Risk Youth. *Journal of Adolescent Health*, 65(5), 627-633. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.05.027>
- Kitchener, K. S. (1984). Intuition, critical evaluation and ethical principles: The foundation for ethical decisions in counseling psychology. *The Counseling Psychologist*, 12(3), 43-55. <https://doi.org/10.1177/0011000084123005>
- Kolay Akfert, S. (2012). Ethical dilemmas experienced by counseling psychologists working at schools and their attitudes and behaviors when faced with these dilemmas. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 12(2), 653-660. <https://eric.ed.gov/?id=EJ981827>
- Lambie, G. W., Ieva, K. P., & Mullen, P. R. (2011). Ego development and ethical decision-making of counseling students. *Counseling and Values*, 55(2), 154-174. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.2011.tb00030.x>
- Lazovsky, R. (2008). Maintaining confidentiality with minors: Dilemmas of school counselors. *Professional School Counseling*, 11(5), 335-346. <https://doi.org/10.1177/2156759X0801100506>
- Luke, M., Goodrich, K. M., & Gilbride, D. D. (2013). Interdisciplinary collaboration: Ethical implications for counselor education. *Counselor Education and Supervision*, 52(3), 178-194
- Marfu'i, L. N. R., Fitri, S., Saripudin, M., & Nufus, N. P. (2025). Dilema Moral Konselor Sekolah: Studi Fenomenologis. *Jurnal Psikoedukasi dan Konseling*, 9(1), 9-20.
- Moyer, M., & Crewell, J. (2024). Ethical decision-making in school counseling. *Journal of School Counseling*, 22(1). <https://doi.org/10.1177/2156759X231200456>
- Moyer, M. S., & Crews, C. (2016). *Applied ethics and decision making in schools*. New York, NY: Routledge
- Moyer, M., Sullivan, J., & Growcock, D. (2012). When is it ethical to inform administrators about student risk-taking behaviors? Perceptions of school counselors. *Professional School Counseling*, 15(3), 98-109. <https://doi.org/10.1177/2156759X1201500301>
- Mullen, P. R., & Gutierrez, D. (2016). Burnout, Stress, and Direct Student Services Among School Counselors. *Professional School Counseling*, 19(1). <https://doi.org/10.5330/1096-2409-19.1.149>

- Mullen, P. R., et al. (2018). School Counselors' Self-Efficacy with Student Suicide Intervention. *Counseling and Values*, 63(2), 205-222. <https://doi.org/10.1002/cvj.12089>
- Oktadinata, D., Fitri, S., & Wahyuni, E. (2025, November). ETHICAL DILEMMA: CHALLENGES AND IMPACTS ON SCHOOL COUNSELOR WELFARE. In *Proceedings of the Education and Psychology International Conference* (pp. 35-50).
- Pack-Brown, S. P., Thomas, T. L., & Seymour, J. M. (2008). Infusing African American intellectual genealogy into the ethical decision-making process of school counselors. *Counseling and Values*, 53(1), 51-64
- Pascoe, M. C., dkk. (2020). The impact of stress on students in secondary school and higher education. *International Journal of Adolescence and Youth*, 25(1), 104-112. <https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823>
- Remley, T. P., & Herlihy, B. (2020). *Ethical, legal, and professional issues in counseling* (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson
- Ratts, M. J., dkk. (2016). Multicultural and Social Justice Counseling Competencies: Guidelines for the counseling profession. *Journal of Multicultural Counseling and Development*, 44(1), 28-48. <https://doi.org/10.1002/jmcd.12035>
- Ratts, M. J., & Greenleaf, A. (2017). Multicultural and Social Justice Counseling Competencies. *Professional School Counseling*, 21(1b). <https://doi.org/10.1177/2156759X18773582>
- Rushton, C. (2016). Moral Resilience: A Capacity for Navigating Moral Distress in Critical Care. *Navigating Moral Distress*, 35(3), 3583-3586. <https://doi.org/10.1111/jan.13098>
- Savitz-Romer, M., dkk. (2020). School counseling in a time of crisis: The role of school counselors in pandemic response. *Professional School Counseling*, 24(1), 1-10. <https://doi.org/10.1177/2156759X20940637>
- Schmidt, J. J. (2014). *Counseling in schools: Essential services and comprehensive programs* (6th ed.). Boston, MA: Pearson
- Shillingford, M. A., & Lambie, G. W. (2010). Contribution of professional school counselors' values and leadership practices to their school counseling program integrity. *Professional School Counseling*, 13(4), 208-216. <https://doi.org/10.1177/2156759X1001300402>
- Sileo, F. J., & Kopala, M. (1993). An A-B-C-D-E worksheet for ethical decision making. *Counseling and Values*, 37(2), 89-95. <https://doi.org/10.1002/j.2161-007X.1993.tb00800.x>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research method: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. (Metodologi sintesis temuan).

- Stone, C. (2022). *Ethics and Law for School Counselors* (6th ed.). Alexandria, VA: American School Counselor Association (ASCA).
- Stone, C. B. (2017). *School Counseling Principles: Ethics and Law*. Alexandria: American School Counselor Association (ASCA).
<https://www.schoolcounselor.org/Books>
- Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the culturally diverse: Theory and practice* (7th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons
- Suroso, A., & Nashori, F. (2021). Pertimbangan etis konselor sekolah dalam menghadapi dilema etik. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(1), 45-58.
<https://doi.org/10.25217/jb.v6i1.1345>
- Suwarjo, S., & Eva, I. D. (2020). Dilema etis konselor sekolah dalam menangani kasus kekerasan seksual. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 4(2), 112-125. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i2.1158>
- Thomas, R. V., & Pender, D. A. (2008). Ethics and advocacy: Transitional identities in school counseling. *Journal of Counseling & Development*, 86(4), 422-428. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.2008.tb02229.x>
- Unger, J. P. (2011). *The ethics of school counseling*. New York, NY: Oxford University Press.
- Warren, J. M., & Baker, S. B. (2013). School counselor's ethical decision-making: The role of cognitive development. *Journal of Counseling & Development*, 91(4), 448-456.
- Wester, K. L. (2019). *Ethics in counseling and psychotherapy: Standards, research, and emerging issues*. New York, NY: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315104447>
- West, S., & Moore, J. L. (2015). CACREP at Historically Black Colleges and Universities. *Journal of Negro Education*, 84(1), 56-65.
<https://doi.org/10.7709/jnegroeducation.84.1.0056>
- Welfel, E. R. (2015). *Ethics in counseling & psychotherapy* (6th ed.). Belmont, CA: Cengage Learning.
- White, M. E., & Morgan, L. W. (2012). The school counselor's role in managing confidentiality with minors. *The Journal of School Counseling*, 10(14).
<http://www.jsc.montana.edu/articles/v10n14.pdf>
- Zambrano, E. (2020). Collaborative ethical decision making in schools. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 42(2), 150-165.